

FATWA JIHAD DAN RESOLUSI JIHAD: HISTORISITAS JIHAD DAN NASIONALISME DI INDONESIA

Juma'

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

juma@uinsby.ac.id

***Abstract;** The arrival of allies in post-independence Indonesia raised concerns among the founding fathers and kiai of re-colonization. One of the responses to the arrival of the allied troops came from Nahdlatul Ulama (NU), which is known for its jihad fatwas and resolusi jihad. The resolusi jihad became NU's national ijtihad in order to prevent re-colonization in Indonesia (defensive jihad). This call calls on the official government of Indonesia to carry out an armed struggle, as well as calling on all people to jihad fi sabilillah. The resolusi jihad is an anti-colonial nationalism that was born out of a burst of love for an independent Indonesia, the arrival of allies, and the Orange Hotel incident. The spirit of nationalism coupled with the precarious condition of the nation gave birth to the jihad fi sabilillah movement. The principle of love for the motherland and jihad to defend an independent country is fardhu ain, obligatory for every Muslim. This spirit of jihad and nationalism swelled among students and fighters for peace against allies, colonialists, for the sake of upholding the sovereignty of the Republic of Indonesia.*

Keywords: Resolusi Jihad, nasionalisme of jihad, anti-colonialism

***Abstrak;** Kedatangan sekutu di Indonesia pasca kemerdekaan memunculkan kekhawatiran di kalangan pendiri bangsa dan kiai akan terjadinya penjajahan kembali. Respon atas kedatangan tentara sekutu salah satunya hadir dari Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal dengan fatwa jihad dan resolusi jihad. Resolusi jihad menjadi ijtihad kebangsaan NU demi menghalau terjadinya penjajahan kembali di Indonesia (jihad defensif). Seruan ini menghimbau pemerintah resmi Indonesia untuk melakukan perjuangan bersenjata, sekaligus menghimbau seluruh rakyat untuk jihad fi sabilillah. Resolusi jihad merupakan nasionalisme anticolonial yang lahir dari letupan kecintaan terhadap Indonesia merdeka, kedatangan sekutu, dan insiden hotel oranje. Semangat nasionalisme yang dibarengi dengan kondisi bangsa yang genting melahirkan gerakan jihad fi sabilillah. Prinsip cinta tanah air dan jihad membela negara merdeka menjadi fardhu ain, wajib bagi setiap muslim. Semangat jihad dan nasionalisme ini menggelembung di kalangan santri dan pejuang untuk berperang melawan sekutu, pejuang, demi tegaknya kedaulatan negara republik Indonesia.*

Keywords: Resolusi Jihad, Jihad Nasionalisme, anti-kolonialisme

Pendahuluan

Sejarah jihad di Indonesia menemukan aktualisasinya di zaman colonial hingga kemerdekaan. Bentuk perjuangan rakyat melawan penjajah menegaskan akan pentingnya membela tanah air. Ada banyak peperangan dan perjuangan fi sabilillah yang telah ditegakkan oleh para kiai dan ulama selama masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia.

Ketika kemerdekaan Indonesia dipromakasikan, tantangan besar datang dari kedatangan sekutu yang dibonceng NICA. Upaya membela tanah air direspon oleh kiai dan ulama dengan seruan jihad fi sabilillah. Salah satu organisasi yang menyerukan jihad fi sabilillah adalah Nahdlatul Ulama (NU). NU merespon

kedatangan sekutu dengan menyeru fatwa jihad dan resolusi jihad. Fatwa jihad dan resolusi jihad adalah upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semangat jihad fi sabilillah.

NU lewat KH. Hasyim Asyari, mengeluarkan fatwa jihad tertanggal 17 September 1945, yang berisi tentang hukum memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia, yaitu tantara NICA. Fatwa jihad ini menjadi acuan bagi lahirnya resolusi jihad tanggal 21-22 Oktober 1945. Resolusi jihad sebagai respon akan pentingnya menjaga negara dan mempertahankan kemerdekaan.

KH Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan para kiai lainnya untuk mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura, atau utusan NU untuk berkumpul di Surabaya tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatul Oelama (ANO) di Jl. Bubutan VI/2.¹ Rapat tersebut dimulai setelah menunggu beberapa Kiai terkemuka dari Jawa Barat, seperti Kiai Abbaas Buntet, dan Kiai Suja'i Indramayu. Pada tanggal 23 KH. Hasyim Asy'ari menggelar rapat yang isinya seruan *jihad fi sabilillah* yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad NU.²

M.C. Ricklefs memberikan catatan bahwa ribuan kiai dari kalangan pesantren, hampir di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Pertemuan yang dipimpin K.H. Hasyim Asy'ari ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan "resolusi jihad", yaitu seruan jihad *fi sabilillah*.³

Menurut Anderson, fatwa jihad tersebut meminta kepada pemerintah republic Indonesia agar bersikap pro aktif dan melakukan tindakan yang nyata untuk membendung segala hal yang membayakan agama dan negara. Fatwa tersebut pun mengindikasikan adanya upaya langsung dari pemerintah republic Indonesia untuk melanjutkan perjuangan yang bersifat sabilillah demi tegakkan NKRI dan agama islam.⁴

Menurut Saifuddin Zuhri sebagaimana dikutip M. Mansyur Amin, isi resolusi jihad ada lima; *pertama*, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. *Kedua*, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah harus dijaga dan ditolong. *Ketiga*, musuh Republik Indonesia adalah Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan tentara sekutu pasti menggunakan cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. *Keempat*, umat Islam wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan tentara sekutu yang ingin menjajah Indonesia kembali. *Kelima*, kewajiban ini merupakan perang suci bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer. Mereka yang tinggal di luar radius itu harus membantu secara meterial terhadap mereka yang berjuang.⁵

Resolusi jihad menjadi semangat nasionalisme, jihad dan heroisme membela tanah air, bangsa, dan negara dari penjajah. Resolusi jihad menjadi gerakan pasca

¹ Gugun el-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i; Biarkan Kebenaran yang Hampir Setengah Abad dikuburkan Catatan Sejarah itu Terbongkar!* (Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2010), h. 72.

² Gugun el-Guyanie, *Resolusi jihad*, h. 74.

³ MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), h. 437

⁴ Benedic Anderson, *Revoloesi Pemoeda* (Jakarta : Sinar Harapan, 1988), h.. 183,

⁵ M. Mansyur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraan* (Yogyakarta: Al-Amien Press, 1996), h. 100-101.

kemerdekaan yang menegaskan perlawanan terhadap kolonialisme, sekutu. Perlawanan rakyat paska kemerdekaan menjadi fokus kajian ini untuk melihat secara lebih mendalam dan komprehensif, berkaitan dengan konstruksi jihad dan nasionalisme.

Penelitian ini menggunakan método deskriptif dengan pendekatan historis. Fokus penelitian ini mengkaji narasi historis jihad dan nasionalisme dengan menggunakan resolusi jihad sebagai objek kajiannya. Dimana keberadaan fatwa dan resolusi jihad telah memberikan api semangat perjuangan rakyat di Jawa Timur, Surabaya. Semangat perjuangan santri pesantren dan laskar Sabilillah dan Hizbullah tidak dapat dipisahkan dari lahirnya resolusi jihad sebagai upaya membela tanah air yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan arsip dan buku sebagai data primier dan sekunder. Data-data yang dikumpulkan seperti Arsip Koran KR tahun 1945 dan buku tentang resolusi jihad, *Resolusi Jihad Paling Syar'i, Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-149)* dan lain sebagainya. Data tersebut dianalisis dengan métode historis; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dengan cara tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang komprehensif tentang nasionalisme berbasis jihad fi sabilillah paska kemerdekaan.

Fatwa Jihad dan Resolusi Jihad

Perjuangan rakyat Indoensia melawan penjajah kembali menggema setelah tanggal 15 September 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta. Tujuan kedatangan mereka untuk melucuti tentara Jepang yang masih di Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia membuat Jepang harus menyerah pada sekutu.

Kedatangan yang awalnya disambut dengan baik dan tangan terbuka, menjadi ranah konflik, ketika Belanda menyerahkan bekas jajahannya ke Inggris, di tengah euforia Indonesia merdeka.

Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi NICA menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia yang baru menggelorakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang telah diproklamasikan harus ternodai dengan isu, Indonesia diserahkan ke Inggris oleh Belanda.

Pengalaman penjajahan, eksistensi negara merdeka merupakan pertimbangan rasional bagi masyarakat Indonesia. Bagi umat Islam, pengalaman berjuang melawan penjajah yang ditunjukkan para pahlawan Islam, perjuangan diplomasi selama masa pendudukan Jepang dan menjelang kemerdekaan menjadi pengalaman yang cukup menentukan ke arah kebijakan dan keputusan yang akan dicapai.

Kedatangan sekutu di berbagai kota besar Indonesia membuat pemimpin Indonesia, Soekarno-Hatta, melakukan upaya diplomasi politik untuk menghentikan pengambilalihan kembali Indonesia ke tangan Belanda. Upaya tersebut tidak berjalan mulus, karena sejak awal, Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia dan menganggapnya hanya euforia kalangan nasionalis. Belanda masih tetap menganggap Indonesia sebagai bekas jajahan Hindia Belanda.

Lahirnya resolusi jihad tidak pernah lepas dari kondisi sebelumnya. Kedatangan tentara sekutu telah memicu kemarahan rakyat, terutama ketika mereka

meminta bendera Belanda dikibarkan demi menghormati Ratu Wilhelmina. Tentara Inggris datang ke Indonesia pada 15 September 1945 dengan tujuan, melucuti tentara Jepang, membebaskan tahanan Jepang, dan memulangkan mereka ke negerinya. Inggris juga punya misi mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda sebagai negara jajahannya.⁶

Proses penyerahan kekuasaan Jepang dipimpin oleh Lord Louis Mountbatten. Pasukan yang dibawa adalah *Allied Force Netherland and East Indies* (AFNEI) yang dipimpin langsung oleh Sir Philip Christon. Dimana, AFNEI merupakan komando bawahan Louis Mountbatten.⁷ Pada awalnya kedatangan AFNEI tidak dicurigai apa pun oleh pemimpin bangsa. Akan tetapi, pandangan ini berubah ketika pemimpin bangsa Indonesia mengetahui bahwa rombongan AFNEI terdapat NICA. Sehingga, AFNEI pun dicurigai sebagai tangan kanan Belanda untuk mengambil alih Indonesia.

Kondisi seperti ini membuat serangkaian perlawanan di berbagai daerah. Rakyat di berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai bergolak. Mereka mulai mencurigai kedatangan tentara sekutu untuk memberikan jalan kepada Belanda menjajah kembali Indonesia.⁸

Sekutu melakukan infiltrasi politik dan militer, karena mereka tidak menganggap kemerdekaan Indonesia sah. Ketika Belanda mendarat di Surabaya dengan kapal sekutu, rakyat menyambutnya dengan penuh amarah. Puncak ketegangan rakyat dan tentara Belanda, terjadi di Hotel Oranje (Hotel Majapahit). Insiden tersebut membuat rakyat merobek bendera, yang menyisakan warna merah putih semata.⁹

Kejadian tersebut, hanya permulaan dari aksi heroisme rakyat setelahnya. Heroisme rakyat mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Jepang, sekutu dan NICA, menginisiasi Soekarno untuk meminta pandangan Kiai dan Ulama tentang hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia ke KH. Hasyim Asy'ari. Zainul Milal el-Bizawie mengatakan fatwa KH. Hasyim Asyari menegaskan bahwa umat Islam wajib membela tanah air dari ancaman asing.¹⁰

KH. Hasyim Asyari, mengeluarkan fatwa jihad, 17 September 1945 tentang seruan jihad fi sabilillah. Fatwa tersebut disiarkan di Koran Kedaulatan Rakyat, 20 November 1945, yang isinya berbunyi; hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah *fardu ain* bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang fakir. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid. Hukumnya orang yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan mereka wajib dihukum mati.¹¹

⁶ Nuk Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1945-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 79

⁷ El-Guyanie, *Resolusi Jihad*, h.68

⁸ Zainul Milal el-Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-149)*, (Jakarta: Pustaka Compass, 2015), h. 197

⁹ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 251-259

¹⁰ el-Bizawie, *Laskar Ulama-Santri*, h. 206

¹¹ El-Bizawie, *Laskar Ulama-Santri*, p. 205

Pengakuan KH. Saifuddin Zuhri, sebagaimana dikutip dalam tabloid majalah *tebuireng* menyatakan:

*"aku baru saja tiba dari Ungaran Semarang ketika mendapat panggilan dari ketua Besar NU agar datang ke Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1945 untuk menghadiri rapat PBNU yang diperlengkapi dengan konsul-konsul seluruh Jawa dan Madura. Selama zaman Jepang hubungan dengan luar Jawa terutama Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil kecuali Bali praktis terputus. Jawa dan Sumatera dikuasi oleh Angkatan Darat Jepang sisanya oleh angkatan laut. Setelah Jepang menyerah, Jawa, Sumatera, Bali diduduki oleh Inggris dan kepulauan lain diduduki oleh Australia keduanya atas nama sekutu. Sebab itu, maka rapat PBNU yang dilengkapi dengan konsul-konsul hanya terbatas pada Jawa dan Madura."*¹²

Fatwa di atas menjadi cikal bakal diadakannya rapat konsul ulama dan ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas masalah jihad melawan penjajah. KH. Hasyim Asy'ari memerintahkan KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan para kiai lain untuk mengadakan musyawarah dengan mengumpulkan Kiai se-Jawa dan Madura. Mereka pun rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama, Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dipimpin Kiai Wahab Hasbullah pada 22-23 Oktober 1945.¹³ Rapat inilah yang akhirnya melahirkan resolusi jihad sebagai landasan hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk melakukan jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia merdeka.

Di tengah suasana yang terus memanas dengan api perlawanan terhadap penjajah, rapat akbar NU ini ditutup dengan sebuah pidato KH. Hasyim Asyari yang menggelegar:

"Apakah ada dan kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah.

Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka, tidak akan surut seujung rambut pun.

*Barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya. Maka barangsiapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang siapa pun orangnya."*¹⁴

¹² Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarahwan Tebuireng, *Resolusi Jihad: Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agama hingga Negara* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015) h. 143 Lihat, Septian Pribadi, "Resolusi Jihad Antara Mitos dan Fakta", Tabloid Tebuireng: Media Pendidikan Islam, "Menuju Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghofur: Mengawal Aktualisasi Resolusi Jihad," Edisi 53, November-Desember 2017, h. 9

¹³ Rizal Mumazziq, "Resolusi Jihad dan Pengaruhnya dalam Kemerdekaan RI", dalam Ahmad Baso, dkk, KH. Hasyim Asyari: Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 55

¹⁴ Rizal Mumazziq, "Resolusi Jihad dan Pengaruhnya dalam Kemerdekaan RI", h. 56 sebagaimana mengutip, Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung,

Hasil rapat tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai pelosok negeri, dengan di siarkan di berbagai media massa, salah satunya adalah Kedaulatan rakyat. Berikut ini salinan naskah asli resolusi jihad sebagaimana yang diberitakan oleh koran Kedaulatan Rakyat;

Resoloesi N.U.

Tentang Djihad fi Sabilillah
Bismillahirrochmanir Rochim

Resoloesi:

Rapat besar wakil-wakil Daerah (Konsul²) Perhimpoean Nahdlatol Oelama seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar:

Bahwa di tiap² Daerah di seluruh Djawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat

Ummat Islam dan Alim Oelama di tempatnya masing 2 untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiap² orang Islam.

b. bahwa di Indonesia mi warga Negeranya adalah sebagian besar terdiri dan Umat Islam.

Mengingat:

a. bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Djepang yang datang dan berada disini telah banyak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggu ketentraman umum.

b. bahwa semua jang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah disini maka dibeberapa tempat telah terdjadi pertempuran jang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.

c. bahwa pertempuran 2 itu sebagian besar telah dilakukan oleh Ummat Islam jang merasa wajib menurut Agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya.

d. bahwa didalam menghadapi sekalian kedjadian 2 itu perlu mendapat perintah dan tuntunan jang njata dari Pemerintah Republik Indonesia jang sesuai dengan kedjadian 2 tersebut.

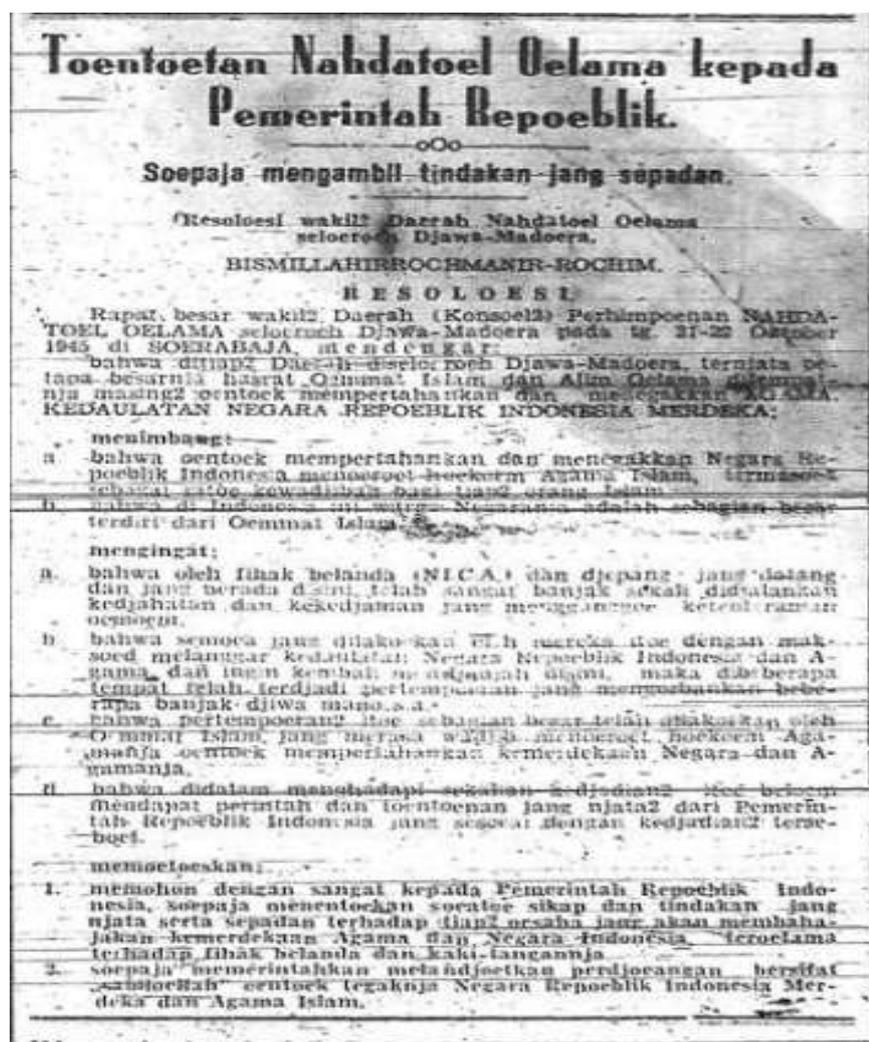
Memutuskan:

1. memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaja menentukan suatu sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap usaha usaha jang akan membahajakan

Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia terutama terhadap fihak Belanda dan kaki-tangannya.

1987), h.339-343 Pidato ini disampaikan dalam Bahasa Arab agar tidak diketahui oleh intelejen Belanda saat itu.

2. supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat “sabilillah” untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.
Surabaya, 22-10-1945
HB. NAHDLATOEL OELAMA.



Sumber: Kedaulatan Rakyat, 26 Oktober 1945, halaman 1

Konsep Jihad NU

Konteks historis dari makna jihad dalam penelitian ini fokus ke fatwa dan resolusi jihad NU. Secara istilah, jihad dimaknai sebagai perang melawan musuh di medan peperangan. Narasi historis dalam fatwa dan resolusi jihad dapat dimaknai sebagai upaya membela diri dan negara dari serangan musuh.

Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Rohimin¹⁵ bahwa jihad ada dua macam, yaitu defensif dan korektif (pembaharuan). Jihad defensif berarti peperangan yang terjadi untuk melindungi islam dan

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat, *KH. Hasyim Asyari dan Resolusi Jihad: dalam Usaha Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tahun 1945*, (Lampung: LADUNY ALIFATAMA, 2018), h.68

pemeluknya dari musuh yang mengancam atau kekuatan yang dapat merusak eksistensi negara. Jihad korektif berarti peperangan yang dilakukan terhadap penguasa tiran atas rakyatnya di negaranya sendiri. Konsep jihad yang dikembangkan Al-Maududi juga mengutuk terhadap jihad yang memaksa orang lain memeluk islam.¹⁶

Menurut pandangan Zainul Milal el-Bizawie, jihad yang dimaksud dalam resolusi jihad adalah perang ketika daerah tersebut diserang musuh. Jihad ini bukan membela agama atau memaksakan orang untuk memeluk islam, melainkan membela diri, membela hak orang lain, dan menjaga kedaulatan daerah atau negara dari musuh.¹⁷

Jihad melawan penjajah berarti peperangan. Peperangan tersebut terjadi karena mereka hendak menguasai negara, memaksakan kehendaknya, dan berencana menguasai kekayaan alam. Penjajahan bertentangan dengan prinsip dan ajaran agama. Agama menekankan pada aspek perdamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Di dalam ajaran islam, persoalan jihad banyak disinggung, baik hadis atau al-quran. Di dalam teks agama, teks jihad selalu bersandingan dengan fi sabilillah, yang menandakan bahwa peperangan menggunakan senjata atau militer. Militer sangat penting untuk mempertahankan martabat bangsa dan melindungi rakyatnya dari gangguan musuh.¹⁸

Narasi jihad berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa narasi jihad tersebut telah ada sejak kolonialisme Belanda dan Jepang, hingga masuknya tentara sekutu pasca kemerdekaan Indonesia. Peperangan atas nama jihad telah berkembang di masa Belanda, seperti perang Banten, Perang Jawa dan lain sebagainya.

Dalam BPUPKI, Mansur Suryanegara mengatakan bahwa demi melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara, negara menaruh kepercayaan besar terhadap rakyat untuk melakukan jihad di jalan Allah, terutama di tangan pemuda dengan semangat dan keteguhan untuk mengorbankan jiwa dan raga.¹⁹

Kekalahan Jepang membuat Indonesia dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Euroria kemerdekaan tidak berlangsung lama, karena tentara sekutu datang ke indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Mereka pun melakukan tindakan nyata yang mengarah pada penjajahan.

Pandangan jihad NU tidak lepas dari muktamar ke-16 di Purwokerto. Putusan muktamar tersebut memiliki 4 poin mendasar; perang menolak penjajahan dan para pembantunya adalah fardhu ain atas setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang daerahnya dimasuki oleh penjajah; wajib ain atas tiap-tiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dari 94 KM dari tempat yang dimasuki penjajah; wajib kiyafah atas segenap orang yang berada di tempat-tempat yang jaraknya 94 KM dari tempat tersebut; dan jika jiwa-jiwa tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak

¹⁶ Jihad memiliki persyaratan yaitu defensive atau membela diri, untuk menghilangkan fitnah, menciptakan perdamaian, dan mewujudkan kebaikan dan keadilan. Perang tidak dibenarkan memaksakan ajaran islam kepada yang bukan islam, untuk tujuan perbudakan, penjajahan, dan perampasan harta kekayaan. Lihat, Ensiklopedi Islam 2 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 315.

¹⁷ El-Bizawie, *Laskar Ulama-Santri*, h.10

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat, *KH. Hasyim Asyari dan Resolusi Jihad.*, h.69

¹⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah I* (Bandung: Salamadina, 2010), h. 396-397

mencukupi melakukannya, maka jiwa yang disebut dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.²⁰

Fatwa jihad KH. Hasyim Asy'ari ini kemudian diperlunak menjadi Resolusi Jihad yang ringkasnya terdapat dua poin utama; pertama, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kiki-tangannya; kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat "sabilillah" untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.

Dalam muktamar ke-11 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Hindia Belanda adalah darul islam yang wajib ditaati.²¹ Muktamar ini berlandaskan pada konsep fiqih, di mana negara dan tanah air wajib dijaga. Kitab fiqih yang dijadikan pedoman adalah *Bughyah al-Murtasyidin*. Berdasarkan pada konsep fiqih tersebut, muktamar memutuskan bahwa Indonesia merupakan negara Islam, *dar al-Islam*. Dalam kitab fiqih, negara dibagi ke dalam tiga bagian; *dar al-islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai) dan *dar al-harb* (negara perang). Negara islam secara konseptual menuntut masyarakatnya untuk berjuang dan mempertahankannya dari serangan musuh, dari luar. Perjuangan mempertahankan negara merupakan wujud normative dari cita-cita sebuah negara.²²

Dalam beberapa kasus, ijtihad politik kebangsaan NU selalu berlandaskan pada fiqih. Beberapa sikap politik NU yang berlandaskan fiqih misalnya, sikap non kooperatif terhadap penjajah, konsep dar-islam, sikap anti meniru penjajah²³ hingga resolusi jihad.²⁴

Narasi Historis Nasionalisme NU

Bibit nasionalisme Indonesia modern dapat dilihat dari bermunculannya organisasi pemuda, seperti Stovia, indische partij, sarekat dagang islam, sarekat islam, muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya.²⁵ Peran islam terhadap nasionalisme sangat penting karena menjadi penggerak utama dan bagian esensial dalam membentuk kekuatan sosial-politik. Organisasi islam selalu punya konsen bagi cita-cita terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa.²⁶

Gerakan nasionalisme yang berkembang di tubuh NU salah satunya ditandai dengan berdirinya *Nahdlatul Wathan* dan *Tashwirul Afkar* yang didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah. *Nahdlatul Wathan* dan *Tashwirul Afkar* menjadi gerakan yang berhasil membangun semangat nasionalisme para ulama dan meningkatkan kapasitas

²⁰ Gugun el-Guyani, *Resolusi Jihad*, h. 61

²¹ Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad*, h. 121

²² Muhamad Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri, Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama", *Addin*, Vol.9, No.2 (Agustus 2015), h.339.

²³ Ini berdasarkan pada konsep "barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu."

²⁴ Muhammad Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri", h. 335

²⁵ Suhaimi, "Relasi Islam dan Nasionalisme", *Al-Qalam*, Vol. 30, No.3 (September-Desember), 2013, h.573-576

²⁶ Suhaimi, Relasi Islam dan Nasionalisme, h.577

intelektual para pemuda.²⁷ Gerakan dan organisasi tersebut yang kemudian menginisiasi berdirinya NU.²⁸

Sejarah keterlibatan NU dalam perjuangan melwan penjajah telah memberikan gambaran tentang semangat anticolonial di kalangan kiai pesantren. NU menjadi salah satu organisasi yang menghimpun kekuatan melawan kolonialisme Belanda dan melawan tantara sekutu yang ingin menjajah kembali Indonesia, pasca kemerdekaan.

Lahirnya NU telah menetaskan gerakan perjuangan rakyat, seperti lalhirnya laskar Hizbullah dengan panglima, KH. Zainul Arifin, Laskar Sabilillah, dengan pemimpinnya, KH. Masykur. Laskar tersebut, siap berjuang untuk menegakkan agama dan negara, dengan jihad fi sabilillah.²⁹

Semangat nasionalisme yang tertanam sejak masa penjajahan, semakin bergemuruh ketika proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dengan ditandai kembalinya penjajah Belanda, yaitu ketika pasukan sekutu mendarat kembali di Indonesia pada 19 september 1945 di Tanjungpriok.

Sebagai Langkah antisipasi akan datangnya bahaya penjajahan kembali, NU menggelar rapat konsul Ulama se-Jawa dan Madura yang menghasilkan resolusi jihad. Resolusi jihad menjadi titik balik pandangan NU dalam politik kebangsaan di Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan sekutu telah menghadirkan semangat nasionalisme yang berbalut nilai-nilai moral keagamaan. Fatwa tersebut telah mampu membangkitkan semangat umat Islam untuk rela berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Setelah resolusi jihad, Barisan Ulama, Barisan Mujahidin, Barisan Hizbullah, dan Sabilillah kembali dibentuk dan diaktifkan.

Tuntutan Nahdlatul Ulama' yang dikenal dengan "Resoeloesi Jihad" ditandatangani dan dibacakan sendiri oleh KH. Hasyim Asy'ary. Pernyataan, tuntutan atau pun resolusi tersebut ditindaklanjuti pada Kongres Masjoemi, selaku organisasi yang memayungi berbagai organisasi umat Islam, di Jogjakarta pada tanggal 7-8 Nopember 1945. Kongres Masyumi diberitakan Kedaulatan Rakyat dengan judul; "60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah, Perang didjalan Allah oentoeik menentang tiap-tiap pendjajahan, Partij Masjoemi sebagai badan perdjoeangan politik Oemmat Islam".³⁰ Dua hari setelah kongres, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya pecah. Strategi politik dan Militer NU dalam pertempuran 10 November 1945 dengan melibatkan Laskar Sabilillah.³¹

²⁷ Mansyur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: AL-Amin, 1996), h. 29-30

²⁸ Salah satu motif berdirinya NU adalah motif nasionalisme. Motif ini lahir karena niatan yang kuat untuk menyatukan ulama dan tokoh agama melawan penjajah. Lihat, Amin Farih, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 2, November 2016, h. 252

²⁹ Amin Farih, *Nahdlatul Ulama*, h. 253

³⁰ *Kedaulatan Rakyat*, 9 November 1945, *60 Miljoen Oemmat Islam Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah*, h. 1

³¹ Sutopo dan Nur Hadi, *Perjuangan Total Brigade IV, Pada Perang Kemerdekaan di Keresidenan Malang*, (Malang : IKIP Malang dan Yayasan Ex Brigade IV, Malang, 1997), h. 57



Sumber: Kedaulatan Rakyat, 9 November 1945

Kongres di Yogyakarta itu secara tegas dan nyata menuntut pemerintah untuk melanjutkan perjuangan dengan membentuk barisan Sabilillah sebagai wadah menampung aspirasi sekaligus wadah raykat untuk berjuang membela dan mempertahankan agama dan negara.

Resolusi Jihad itu tampak sederhana, tetapi bagi umat Islam dan NU khususnya, mempunyai makna sangat mendalam. Implikasi dari Resolusi Jihad ini adalah kerelaan berkorban jiwa, raga dan harta untuk mempertahankan tanah air yang telah diproklamasikan kemerdekaannya. Mobilisasi massa lewat gerakan sabilillah (tantara Hizbulla dan Sabilillah) terus diperkuat untuk membendung bahaya akan datangnya kolonialisme di Indonesia pasca kemerdekaan.

Lahirnya resolusi jihad menjadi tanda bahwa negara Indonesia sebagai dar-islam wajib diperjuangkan oleh umat islam. Nasionalisme yang dikonseptualisasikan disini berarti mencintai agama dan negara. Membela agama berarti membela membela tanah air. Membela negara berarti membela atau berjuang melawan penjajah, dengan jihad fi sabilillah.

Perang membela tanah air, bangsa dan kemerdekaan sama halnya dengan jihad *fi sabilillah*, yakni perang di jalan Allah, dan perang membela agama Allah. Kepercayaan yang demikian kuat seperti ini merupakan motivasi vital yang membangkitkan keberanian menghadapi maut. Mati dalam perang kemerdekaan adalah syahid, dan syahid adalah kematian paling terhormat. Tidak ada kematian yang lebih mulia dari pada syahid di jalan Allah. Kematian seperti ini tiada balasan selain surga belaka.³²

Tanah air, bangsa, dan kemerdekaan merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan oleh umat Islam. Membela tanah air dan bangsa adalah bentuk nasionalisme dan kecintaan terhadap agama. Adanya pembelaan terhadap tanah air menjadi bentuk pembelaan terhadap agama. Dengan kata lain, membela tanah air sama halnya dengan membela agama dan perang di jalan Allah.

Membela tanah air sebagai bentuk implementasi kecintaan terhadap agama merupakan mainstream yang dibangun oleh NU demi membangkit semangat perlawanan terhadap penjajah di Indonesia. Semangat inilah yang terus dipupuk dan dipelihara umat islam atau NU dalam memberikan semangat perjuangan bagi masyarakat arus bawah.

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun, semangat ini yang terus dikibarkan dan dipelihara dalam masyarakat. Apalagi, semangat nasionalisme yang dikumandangkan NU, ada motif keagamaan di dalamnya, seperti jihad di jalan Allah dan mati syahid. Doktrin agama yang bersandingan dengan semangat nasionalisme menjadi daya gerak yang begitu besar untuk mengakomodir masyarakat dalam berjuang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. semangat ini yang menjadi pendorong massif dan besarnya perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia. Bahkan, warga negara atau pribumi yang mendukung penjajah akan dianggap sebagai penghianat atau pemecah belah bangsa.³³

Hukum membela tanah air adalah wajib. Umat islam diharamkan meninggalkan peperangan atau mundur ketika berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 KM. sedangkan di luar radius tersebut, kewajiban umat islam menjadi kifayah (*fardhu kifayah*) atau kewajiban kolektif. Sedangkan orang-orang yang berada di radius tersebut mengalami kewalahan atau kekalahan, maka umat islam di luar radius tersebut, wajib berperang di jalan Allah.³⁴

Resolusi jihad dapat terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak luar bisa bagi semangat perjuangan rakyat Indonesia menghadapi penjajah. Adanya Hizbullah dan Sabilillah merupakan strategi politik dan militer NU yang dapat memobilisasi umat di arus bawah. Resolusi jihad telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam skala besar di indonesia. Pertempuran besar paska kemerdekaan, 10 November 1945 telah

³² El-Guyanie, *Resolusi Jihad*, h. 79-80

³³ El-Guyanie, *Resolusi Jihad*, h. 80

³⁴ El-Guyanie, *Resolusi Jihad*, h. 41

menjadi simbol nasionalisme umat, sekaligus simbol nasional perjuangan rakyat melawan penjajahan.

Semangat resolusi jihad adalah anti kolonial dan antikomproh terhadap penjajahan. Walau pun mengalami kekalahan dalam pertempuran 10 November 1945, umat Islam, arek suroboyo, dan rakyat telah memberikan inspirasi bagaimana semangat juang mempertahankan kemerdekaan. Semangat nasionalisme anti-kolonial dinyalakan para ulama untuk mengusir penjajahan di bumi Indonesia.

Pertempuran Surabaya yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, khususnya umat Islam, menunjukkan bahwa anggapan atau tuduhan terhadap kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia adalah berasal dari Jepang, tidaklah benar.³⁵ NU dengan laskar santri dan arek suroboyo, telah memberikan sumbangsih dalam mempertahankan kemerdekaan. Seruan jihad tersebut telah membakar api revolusi di dada santri dan pemuda, sekaligus mengguncang sendi-sendi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Identitas Nasionalisme NU

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme anti kolonialisme dan anti imperialisme. Dimana, kolonialisme memiliki ciri khas berupa penghilangan terhadap harga diri manusia (*the human dignity*).³⁶ Terbentuknya Indonesia sebagai *nation state* disebabkan oleh faktor geografis, bahasa, ekonomi dan kondisi psikologis sebagai bangsa terjajah. Masa lalu penjajahan telah memberikan bekas luka psikologi yang mendalam bagi masyarakat. Pengalaman masa lalu inilah yang melahirkan solidaritas dan semangat perjuangan melawan penjajahan secara kontinyu.

Secara substansial, nasionalisme memiliki dua faktor: pertama, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnik dan agama. *Kedua*, adanya kesadaran dan semangat untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan dari muka bumi Indonesia.³⁷ Hal ini, tercermin dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi; “segala bentuk penjajahan dan penindasan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”³⁸

Menurut Partha Chatterjee³⁹ bahwa gerakan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh kaum nasionalis atau Islamis lebih bersifat gerakan nasionalisme anti-kolonial. Nasionalisme anti-kolonial memisahkan dunia material dan dunia spiritual yang membentuk institusi dan praktik sosial masyarakat pascakolonial.

³⁵ Najib Jauhari, “Laskar Sabilillah Malang dalam Pertempuran 10 November 1945”, *Jurnal Sejarah, Kajian Sejarah dan Pengajannya*, Malang: Jurusan Sejarah FS Malang, 2006, h. 61.

³⁶ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 7.

³⁷ Redaksi Great publisher, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Galang Perss, 2009), h.64.

³⁸ Ketut Rusmulyani, *Semangat Nasionalisme dalam Bingkai Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2020), h. 61

³⁹ Partha Chatterjee, “Whose Imagined Community”, dalam Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial History*, (New Jersey: Princenton University Press, 1993), h.6 Partha Chatterjee merupakan sosok pengkaji nasionalisme pascakolonial yang sekaligus mengkritik konstruksi berpikir Ben Anderson tentang nasionalisme sebagai implikasi dari print-capitalism, h. 5

Dunia material adalah "dunia luar" meliputi ekonomi, tata negara, serta sains dan teknologi. Dunia material dianggap sebagai superioritas barat yang perlu dipelajari dan direplikasi oleh dunia Timur. Sementara, dunia spiritual adalah sebuah "dunia dalam" yang membawa tanda esensial dari identitas budaya. Dalam konteks ini, kemampuan timur (nasionalis dan islamis) menerjemahkan dan mengimitasi dunia materi akan mampu memberikan perbedaan dalam spirit gerakan nasionalisme. Dalam dunia spiritual ini, nasionalisme masyarakat pascakolonial mengklaim kedaulatan sepenuhnya terhadap pengaruh-pengaruh dari Barat.

Berdasarkan teori di atas, resolusi jihad merupakan gerakan nasionalisme "dunia spiritual". Dimana, agama menjadi basis moral dalam memobilisasi massa, yaitu jihad fi sabilillah. Seruan jihad fi sabilillah mempertahankan negara dari ancaman penjajah dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan nasionalisme anti-kolonial yang mengedepankan kekuatan spiritual. Nasionalisme berbasis spiritual ini, menurut Partha Chatterjee merupakan gerakan nasionalisme yang banyak berkembang di Asia dan Afrika sebagai bentuk perlawanan atas dominasi imperialisme dan kolonialisme.⁴⁰

Fatwa dan Resolusi jihad NU merupakan upaya *defensif* dalam merespon kedatangan tentara sekutu. Seruan berperang dan mempertahankan kemerdekaan menegaskan pola perubahan semangat nasionalisme di Indonesia. Dimana, NU hadir dengan seruan perang di jalan Allah sebagai fardhu ain.

Resolusi jihad sebagai gerakan nasionalisme pascakolonial menjadi bukti nyata akan kekuatan spiritual yang menggerakkan massa dalam mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad yang diselenggarakan 21-22 Oktober 1945 diperkuat kembali dengan muktamar di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945 untuk menentukan sikap dalam melawan penjajah. Seruan berperang melawan penjajah memberikan semangat luar biasa besar bagi rakyat untuk bergabung dengan laskar-laskar rakyat, seperti Hizbullah dan Sabilillah.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, maka seruan jihad yang dilakukan oleh NU sebagai bentuk ungkapan nasionalisme berlangsung selama tiga kali. Fatwa jihad tertanggal 17 September 1945 sebagai sikap politik anticolonial, seruan jihad tertanggal 22 Oktober 1945-23 Oktober 1945, deklarasi resolusi jihad, seruan jihad fi sabilillah.⁴²

Fatwa jihad dan deklarasi resolusi jihad tersebut menjadi penegas akan sikap politik kiai dan NU bahwa penjajahan merupakan bentuk kezaliman yang melanggar perikemanusiaan yang benar-benar diharamkan. Maka, untuk membasmi tindakan yang dilakukan oleh setiap imperialisme di Indonesia maka setiap muslim wajib berjuang dengan jiwa dan raganya untuk mempertahankan negara dan agamanya.⁴³

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menegaskan bahwa kekuatan semangat nasionalisme banyak dipengaruhi oleh nilai agama. Ketika perjuangan mempertahankan kemerdekaan, semangat nasionalisme lebih fokus ke arah pertahanan kemerdekaan. Artinya, kemerdekaan yang telah diproklamasikan menjadi harga mati untuk dipertaruhkan hingga tetes darah penghabisan.

⁴⁰ Partha Chatterjee, "Whose Imagined Community", h.6

⁴¹ El-Guanyie, *Resolusi Jihad*, h.12-13

⁴² Abdul Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU, Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), h. 38

⁴³ Kedaulatan Rakjat, 9 November 1945

Sasaran berperang mempertahankan kemerdekaan dengan seruan membentuk barisan fi sabilillah dan meminta bantuan ke luar negeri adalah kaum penjajah yang diidentifikasi sebagai kaum kafir yang telah mengusik dan menganiaya bangsa Indonesia. Penciptaan terma “kafir” bagi penjajah merupakan upaya untuk menguatkan dan memperkokoh basis perjuangan rakyat atas nama agama.

Dalam koridor ini, nasionalisme paska kemerdekaan yang dihembuskan oleh NU dengan seruan jihad fi sabilillah mengarah nasionalisme yang berakar pada dimensi spiritualitas dan teologi agama (islam). Dimensi spiritual inilah yang telah membangkitkan api perjuangan umat islam, tidak hanya di Surabaya, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Dengan seruan jihad fi sabilillah, NU telah memupuk dan memelihara kobaran api perjuangan umat di arus bawah.

Penutup

Resolusi jihad merupakan hasil pergulatan pemikiran kiai NU dalam menyikapi situasi politik di masa revolusi. Hal ini menunjukkan bahwa NU merupakan salah satu kekuatan terdepan dan revolusioner dalam mengobarkan api anti-kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Resolusi jihad menebarkan api semangat nasionalisme dengan sebuah keyakinan bahwa NKRI final dan berjuang mempertahankan kemerdekaan sesuai syariat agama. Fatwa resolusi jihad merupakan seruan perang di jalan Allah demi menegakkan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman tentara sekutu. Semangat nasionalisme dalam resolusi jihad berakar pada aspek teologis agama islam yang menekankan adanya perang di jalan Allah. Dengan menekankan pada konsep fiqh tentang *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* dalam berjihad mempertahankan kemerdekaan, resolusi jihad menjadi penegas bahwa semangat nasionalisme berakar kuat di dalam agama.

BIBLIOGRAPHY

- Amin, M. Mansyur. *NU & Ijtihad Politik Kenegaraan*. Yogyakarta: Al-Amien Press, 1996
- Anderson, Benedic. *Revoloesi Pemoeda*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Bustami Abdul Latif dan Tim Sejarawan Tebuireng. *Resolusi Jihad: Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agama hingga Negara*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015
- Chatterjee, Partha. *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial History*. New Jersey: Princenton University Press, 1993
- Dkk, Ahmad Baso. *KH. Hasyim Asyari: Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017
- El-Bizawie, Zainul Milal. *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-149)*. Jakarta: Pustaka Compass. 2015
- El-Guyanie, Gugun. *Resolusi Jihad Paling Syar'i; Biarkan Kebenaran yang Hampir Setengah Abad dikuburkan Catatan Sejarah itu Terbongkar!.* Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2010.
- Ensiklopedi Islam 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

- Fadli, Muhammad Rijal dan Bobi Hidayat. *KH. Hasyim Asyari dan Resolusi Jihad: dalam Usaha Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tahun 1945*. Lampung: LADUNY ALIFATAMA. 2018
- Farih, Amin, “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 2, November 2016
- Frederick, William H. *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1989
- Jauhari, Najib, “Laskar Sabilillah Malang dalam Pertempuran 10 November 1945”, *Jurnal Sejarah, Kajian Sejarah dan Pengajannya*. Malang; Jurusan Sejarah FS Malang, 2006
- Karim, Abdul Ghaffar. *Metamorfosis NU, Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Kedaulatan Rakyat, 9 November 1945,
- Mustaqim, Muhamad. “Politik Kebangsaan Kaum Santri, Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama”, *Addin*, Vol.9, No.2 Agustus 2015
- Pribadi, Septian. “Resolusi Jihad Antara Mitos dan Fakta”, *Tabloid Tebuireng: Media Pendidikan Islam*, “Menuju Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghofur: Mengawal Aktualisasi Resolusi Jihad,” Edisi 53, November-Desember 2017
- Redaksi Great publisher. *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, Dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Galang Perss. 2009
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2008
- Ridwan, Nuk Khalik. *NU dan Bangsa 1945-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rusmulyani, Ketut. *Semangat Nasionalisme dalam Bingkai Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Sidoarjo, Nizamia Learning Center. 2020
- Suhaimi, “Relasi Islam dan Nasionalisme”, *Al-Qalam*, Vol. 30, No.3. September-Desember. 2013
- Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah I*. Bandung: Salamadina. 2010
- Sutopo dan Nur Hadi. *Perjuangan Total Brigade IV , Pada Perang Kemerdekaan di Keresidenan Malang*. Malang : IKIP Malang dan Yayasan Ex Brigade IV, Malang, 1997
- Zuhri, Saifuddin. *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung. 1987